

## ABSTRAK

Penggunaan senjata kimia tetap menjadi isu serius dalam hukum internasional meskipun telah terdapat instrumen yang secara tegas melarangnya, yaitu *Chemical Weapons Convention* (CWC) 1993. Keberadaan CWC sebagai perjanjian internasional yang bersifat *hard law* menunjukkan adanya komitmen kuat komunitas internasional untuk melarang secara menyeluruh pengembangan, produksi, perolehan, penyimpanan, dan penggunaan senjata kimia. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan norma hukum dan efektivitas implementasinya. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada status hukum senjata kimia dalam hukum internasional serta bentuk sanksi yang dapat diterapkan berdasarkan ketentuan CWC. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perjanjian internasional dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa CWC serta bahan hukum sekunder yang mencakup literatur, jurnal, dan dokumen relevan yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional dan hukum perlucutan senjata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan senjata kimia telah ditetapkan sebagai norma hukum internasional yang bersifat *hard law* dan mengikat seluruh negara pihak tanpa pengecualian, serta tidak memperbolehkan adanya reservasi. Penggunaan zat kimia beracun seperti Novichok untuk tujuan bermusuhan dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan CWC dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Ketentuan dalam CWC tidak mengatur sanksi dalam bentuk represif, melainkan menitikberatkan pada mekanisme kepatuhan melalui tindakan korektif dan pembatasan hak serta keistimewaan negara pihak sebagai bentuk sanksi institusional yang dijalankan oleh *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW). Penerapan sanksi yang bersifat koersif berada di luar kerangka CWC dan bergantung pada mekanisme internasional lain, termasuk melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara kekuatan mengikat norma *hard law* dan kesesuaian penerapan sanksi di tingkat praktik internasional yang dipengaruhi oleh kepentingan politik serta keterbatasan mekanisme penegakan hukum.

**Kata Kunci:** *Chemical Weapons Convention*, senjata kimia, *hard law*, *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons*, sanksi institusional.